

BAB II

GAMBARAN UMUM

1.1 Gambaran Pemerintahan

Kabupaten Rembang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan kekayaan budaya, potensi alam, serta sektor-sektor ekonomi yang berkembang. Pemerintahan Kabupaten Rembang dikelola dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang bersifat pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Di tingkat pemerintahan daerah, Kabupaten Rembang dipimpin oleh seorang Bupati yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Penyelenggaran birokrasi dan pengelolaannya, wakil bupati membantu bupati serta perangkat daerah yang bertugas sesuai dengan fungsi serta tanggung jawab, termasuk perencanaan serta implementasi program-program pembangunan di berbagai sektor. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Rembang didorong oleh visi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan berbagai program yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan ekonomi daerah. Berikut ialah visi dan misi terbaru Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026:

Visi: "Rembang Gemilang 2026"

Misi:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan birokrasi
2. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang berkelanjutan
4. Pemberdayaan desa melalui potensi lokal

1.2 Kondisi Geografis

Posisi ini memberikan Rembang potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan perdagangan lintas provinsi. Rembang ialah kabupaten yang terletak di bagian paling timur Jawa Tengah dan berada di pesisir utara Pulau Jawa. Daerah ini berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya, baik yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Kabupaten Rembang memiliki batas wilayah, yaitu Laut Jawa di utara, Kabupaten Blora di selatan, Kabupaten Pati di barat, dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur.

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 hektare, terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan. Kecamatan Sale adalah yang terluas dengan 10.715 hektare, sedangkan Kecamatan Sluke adalah yang terkecil dengan 3.759 hektare. Rincian data administratif tiap kecamatan di Kabupaten Rembang tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang 2024

No.	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(Ha)	(Persen) Thd Total
1.	Sumber	18	7.673	7,57
2.	Bulu	16	10.240	10,10
3.	Gunem	16	8.020	7,91
4.	Sale	15	10.715	10,57
5.	Sarang	23	9.133	9,01
6.	Sedan	21	7.964	7,85
7.	Pamotan	23	8.156	8,04
8.	Sulang	21	8.454	8,34
9.	Kaliori	23	6.150	6,06
10.	Rembang	34	5.881	5,80
11.	Pancur	23	4.593	4,53
12.	Kragan	27	6.166	6,08
13.	Sluke	14	3.759	3,71
14.	Lasem	20	4.504	4,44
Kabupaten Rembang		294	101.408	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2024.



Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang

Sumber: RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

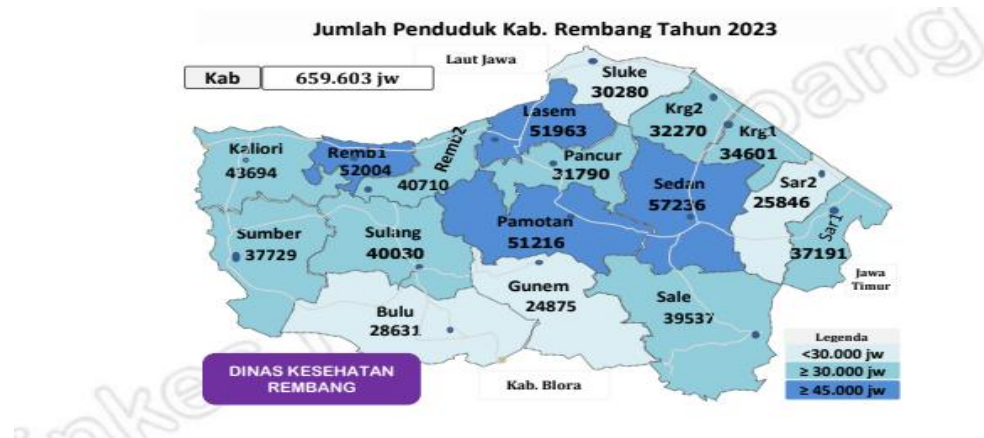
Kabupaten Rembang terletak pada koordinat 111°00'–111°30' Bujur Timur dan 6°30'–7°6' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 101.408 hektare yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan. Posisi Kabupaten Rembang sebagai pintu gerbang timur Jawa Tengah membuatnya memiliki potensi besar untuk pengembangan perdagangan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya, terutama di Kecamatan Sarang dan Sale. Wilayah selatan Rembang berupa daerah perbukitan yang merupakan bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncak tertinggi Gunung Butak (679 mdpl). Di bagian utara, terdapat perbukitan dengan puncak Gunung Lasem (806 mdpl). Kedua kawasan ini kini dilindungi sebagai Cagar Alam Gunung Butak dan Hutan Lindung Gunung Lasem.

1.3 Kondisi Sosial Masyarakat

1.3.1 Jumlah Penduduk

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Rembang berjumlah sekitar 659.603 orang. Dengan total luas wilayah mencapai 1.035,7 km², Kabupaten Rembang memiliki rata-rata kepadatan penduduk sekitar 636,9 jiwa per km². Konsentrasi penduduk tertinggi berada di dua kecamatan, kepadatan Kecamatan Rembang mencapai 1.506,3 jiwa per km², serta Kecamatan Lasem yang memiliki kepadatan

1.126,7 jiwa per km². Wilayah paling lapang di Kecamatan Bulu dengan tingkat kepadatan penduduk 283,2 jiwa per km².



Gambar 2. 2 Peta Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kab. Rembang

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rembang, 2023.

Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Rembang 92.714 jiwa (14,1 %) dan jumlah terkecil di Kecamatan Gunem 24.875 jiwa (3,8 %).

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA	KEPADATAN PENDUDUK per km ²
			DESA	KELURAHAN	DESA + KELURAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sumber	76,73	18	0	18	37.729	13.004	2,9	491,7
2	Bulu	102,40	16	0	16	28.631	10.323	2,8	279,6
3	Gunem	80,20	16	0	16	24.875	8.770	2,8	310,2
4	Sale	107,15	15	0	15	39.537	14.214	2,8	369,0
5	Sarang	91,33	23	0	23	63.037	21.447	2,9	690,2
6	Sedan	79,64	21	0	21	57.236	19.211	3,0	718,7
7	Pamotan	81,56	23	0	23	51.216	17.166	3,0	628,0
8	Sulang	84,54	21	0	21	40.030	14.059	2,8	473,5
9	Kaliori	61,50	23	0	23	43.694	14.779	3,0	710,5
10	Rembang	58,81	27	7	34	92.714	31.031	3,0	1576,5
11	Pancur	45,93	23	0	23	31.790	10.904	2,9	692,1
12	Kragan	61,66	27	0	27	66.871	23.243	2,9	1084,5
13	Sluke	37,59	14	0	14	30.280	10.664	2,8	805,5
14	Lasem	45,04	20	0	20	51.963	17.381	3,0	1153,7
KABUPATEN/KOTA		1.014,08	287	7	294	659.603	226.196	2,9	650,4

Gambar 2. 3 Tabel Luas Wilayah Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota Rembang 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rembang, 2023.

Jumlah rumah tangga sebanyak 226.196 dengan rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebanyak 3 jiwa.

Rasio jenis kelamin memberikan gambaran tentang keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah, yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis struktur demografi dan kebutuhan sosial. Rasio ini menggambarkan berapa banyak laki-laki yang ada untuk setiap 100 perempuan dalam suatu wilayah.

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	0 - 4	22.705	21.268	43.973	106,8
2	5 - 9	24.933	23.418	48.351	106,5
3	10 - 14	25.531	23.782	49.313	107,4
4	15 - 19	23.950	22.420	46.370	106,8
5	20 - 24	25.741	24.914	50.655	103,3
6	25 - 29	24.250	23.191	47.441	104,6
7	30 - 34	24.104	23.884	47.988	100,9
8	35 - 39	24.619	24.737	49.356	99,5
9	40 - 44	26.378	26.137	52.515	100,9
10	45 - 49	24.027	24.000	48.027	100,1
11	50 - 54	21.853	22.255	44.108	98,2
12	55 - 59	19.952	20.910	40.862	95,4
13	60 - 64	16.923	17.698	34.621	95,6
14	65 - 69	12.202	12.487	24.689	97,7
15	70 - 74	8.190	7.531	15.721	108,8
16	75+	6.397	9.216	15.613	69,4
KABUPATEN/KOTA		331.755	327.848	659.603	101,2
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)				43	

Gambar 2. 4 Tabel Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten/Kota Rembang Tahun 2023

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Rembang Tahun 2023.

Menurut data Dukcapil Kabupaten Rembang tahun 2023, jumlah laki-laki mencapai 331.755 orang, dan perempuan berjumlah 327.848 orang. Rasio jenis kelaminnya ialah 101,2, yang artinya ada sekitar 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Jika dilihat berdasarkan umur, mayoritas

penduduk—baik laki-laki maupun perempuan—berada pada kelompok usia muda dan produktif, terutama antara usia 0–4 hingga 40–44 tahun. Jumlahnya lebih tinggi dibandingkan penduduk usia 55 tahun ke atas atau kelompok pra-lansia dan lansia.

1.3.2 Angka Perkawinan Penduduk

Jumlah pernikahan penduduk Kabupaten Rembang menunjukkan tren signifikan, dengan data terbaru mencatat adanya peningkatan angka pernikahan dini di beberapa kecamatan. Hal ini mencerminkan tantangan sosial yang perlu diatasi, terutama dalam upaya perlindungan anak dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Informasi ini menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan yang efektif untuk mengurangi angka pernikahan di daerah tersebut.

Tabel 2. 2 Angka Dispensasi Pernikahan Dini di Kabupaten Rembang Berdasarkan Kecamatan tahun 2023-2024

No.	Kecamatan	Angka Pernikahan Dini		Jumlah
		Istri	Suami	
1.	Bulu	25	1	26
2.	Gunem	23	1	24
3.	Kaliori	5	-	5
4.	Kragan	37	2	39
5.	Lasem	18	5	23
6.	Pamotan	18	3	21
7.	Pancur	15	3	18
8.	Rembang	25	3	28
9.	Sale	34	3	37
10.	Sarang	64	7	71
11.	Sedan	46	6	52
12.	Sulang	16	3	19
13.	Sumber	25	8	33

Sumber: DINSOS PPKB Kabupaten Rembang, 2023-2024.

Berdasarkan data Angka Dispensasi Pernikahan Dini di Kabupaten Rembang untuk tahun 2023-2024, terdapat variasi angka pernikahan dini di setiap kecamatan. Kecamatan Sarang mencatat angka tertinggi dengan 71 kasus, terdiri dari 64 istri dan 7 suami. Diikuti oleh Kecamatan Sedan dengan 52 kasus, yang terdiri dari 46 istri dan 6 suami. Sementara itu, Kecamatan Kaliori mencatat angka terendah dengan hanya 5 kasus pernikahan dini. Secara keseluruhan, angka pernikahan dini di Kabupaten Rembang menunjukkan tantangan yang perlu ditangani, terutama di kecamatan-kecamatan dengan angka yang lebih tinggi.

1.3.3 Indikator Pembangunan Manusia (IPM)

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang meningkat menjadi 72,53 pada tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 0,64 poin atau 0,89% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 71,89. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat Rembang dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tingkat pembangunan suatu wilayah berdasarkan tiga aspek penting: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup penduduk. Di Kabupaten Rembang, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir tercatat sebesar 74,98 tahun,

menunjukkan indikator kesehatan masyarakat yang relatif baik. Di bidang pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 7,73 tahun, sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) berada di angka 12,30 tahun. Dari sisi ekonomi, Pengeluaran Per Kapita masyarakat tercatat sebesar Rp 11.830.000. Tren peningkatan IPM dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Rembang telah mencapai tingkat yang baik. Hal ini menunjukkan adanya upaya konsisten dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tabel 2. 3 Tren IPM Kabupaten Rembang dalam Konteks Regional dan Nasional Tahun 2020–2024

Tahun	Kabupaten Rembang	Kabupaten Pati	Eks-Karisidenan Pati	IPM Nasional
2020	70,02	72,00	71,50	71,94
2021	70,43	72,85	73,39	73,77
2022	71,00	73,14	73,39	74,39
2023	71,89	73,59	73,39	74,39
2024	72,53	74,10	73,87	75,02

Sumber: BPS Jawa Tengah.

Berdasarkan tabel tersebut peningkatan IPM di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati mencerminkan keberhasilan upaya pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan laju pertumbuhan IPM antara kedua kabupaten, keduanya menunjukkan tren positif yang sejalan dengan perbaikan kualitas hidup secara nasional. Pemerintah daerah diharapkan

terus fokus pada sektor-sektor kunci seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi untuk mempertahankan dan mempercepat laju peningkatan IPM di masa mendatang.

1.3.4 Aspek Kesehatan

Dalam periode tahun 2020 hingga 2023, aspek kesehatan di Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Salah satu pencapaian signifikan yang diraih ialah penurunan angka kematian ibu (AKI), dari 13 kasus pada tahun 2020 menjadi 6 kasus pada tahun 2022. Begitu pula dengan angka kematian bayi (AKB), yang berhasil diturunkan dari 138 kasus menjadi 90 kasus dalam periode yang sama. Keberhasilan ini berkaitan erat dengan implementasi program inovatif seperti "Telponi" (Temokno, Laporno, Openi), yang memungkinkan deteksi dan penanganan kasus dilakukan secara cepat dan tepat. Di samping itu, cakupan kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mengalami perkembangan pesat. Hingga tahun 2023, lebih dari 96% penduduk Kabupaten Rembang telah menjadi peserta JKN, dan angka tersebut meningkat menjadi 98,35% pada awal tahun 2024. Atas capaian tersebut, Kabupaten Rembang menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai pengakuan atas upaya Kabupaten

Rembang dalam mencapai cakupan kesehatan universal bagi masyarakatnya.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga tercermin dari status akreditasi Puskesmas. Hingga akhir 2023, sebanyak 11 dari 17 Puskesmas di Kabupaten Rembang telah mendapatkan akreditasi paripurna, dan sisanya tengah dalam proses penilaian. Di sisi lain, RSUD dr. R Soetrasno Rembang terus meningkatkan kapasitas layanan dengan membuka berbagai poli baru seperti Poli Jantung, Poli Kemoterapi, Poli Urologi, dan Poli Psikiatri. Upaya peningkatan kualitas kesehatan juga didukung oleh program sosial dan pendidikan, seperti Gerakan Ayo Sekolah 12 Tahun (GAS Pol 12), yang berhasil mengembalikan ratusan anak putus sekolah ke bangku pendidikan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Dalam aspek pencegahan stunting, pemerintah daerah menargetkan penurunan prevalensi balita stunting dari 19,5% pada 2023 menuju angka ideal 5,78% pada tahun 2045 melalui intervensi gizi dan edukasi masyarakat. Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

1.4 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB)

Kabupaten Rembang memiliki lembaga daerah bernama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PKH) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016. Dinsos PPKB berperan penting dalam menjalankan program-program pemerintah daerah terkait kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengaturan kependudukan melalui keluarga berencana. Pengawasan kedudukan juga dilakukan oleh Dinsos PPKB sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016. Selain itu, DINSOS PPKB bertugas memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Alamat Dinsos PPKB Kabupaten Rembang adalah Jalan Pemuda KM.2, Kabongan Kidul, Rembang, Jawa Tengah 59217 dengan Nomor Telepon / Faximile (0295) 691209.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program-program sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, lembaga ini mengawasi program-program yang berkaitan dengan pengendalian populasi dan keluarga berencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang diketuai oleh Kepala Dinas, melapor pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang berperan sebagai pelaksana unsur penunjang daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana, sesuai RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026. Mendasar pada kondisi umum, evaluasi kinerja, permasalahan dan isu strategis, maka tujuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2022-2026, mengarah kepada 5 hal pokok yakni :

1. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup penduduk miskin;
2. Meningkatkan keberdayaan gender dan perlindungan anak;
3. Mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas;
4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Adapun sasaran dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ialah:

1. Penurunan PPKS dan Masyarakat miskin (desil 1 dan 2);
2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
3. Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana;
4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 ialah “Terwujudnya Rembang Gemilang 2026”. Rembang Gemilang menjabarkan visi masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera, yang ditandai oleh kemakmuran ekonomi, yang dicapai melalui kemajuan pembangunan pertanian dan industri. Selain itu, visi tersebut mencakup rasa aman dan tenteram dalam masyarakat, yang didukung oleh perlindungan jaminan sosial yang menyeluruh, layanan birokrasi yang baik, dan penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan yang bermutu. Lebih jauh, visi tersebut mencakup pengembangan masyarakat yang demokratis, konsep GEMILANG menggambarkan semangat pembangunan yang kuat dan berdaya saing, dengan penekanan pada kerja sama dan pemberdayaan masyarakat. GEMILANG dimaknai sebagai GEMati, gampIL, dan gamblANG. Gemati melambangkan semangat Rembang dalam merangkul warganya dengan kepedulian dan perlindungan, demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, sejahtera secara ekonomi, dan harmonis dalam kehidupan sosial.

- Gampil berarti upaya pembangunan yang fokus pada peningkatan kemampuan manusia dan pengelolaan sumber daya alam secara maksimal, dengan prinsip utama bahwa hasil

pembangunan harus mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

- Gamblang menggambarkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik serta mendukung kehidupan sosial masyarakat, dengan mengedepankan keterbukaan, kejelasan ukuran, dan pertanggungjawaban.

Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang ialah Misi Ketiga “Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan” dengan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan jaminan sosial yang memadai.
2. Membangun infrastruktur dan fondasi ekonomi yang kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

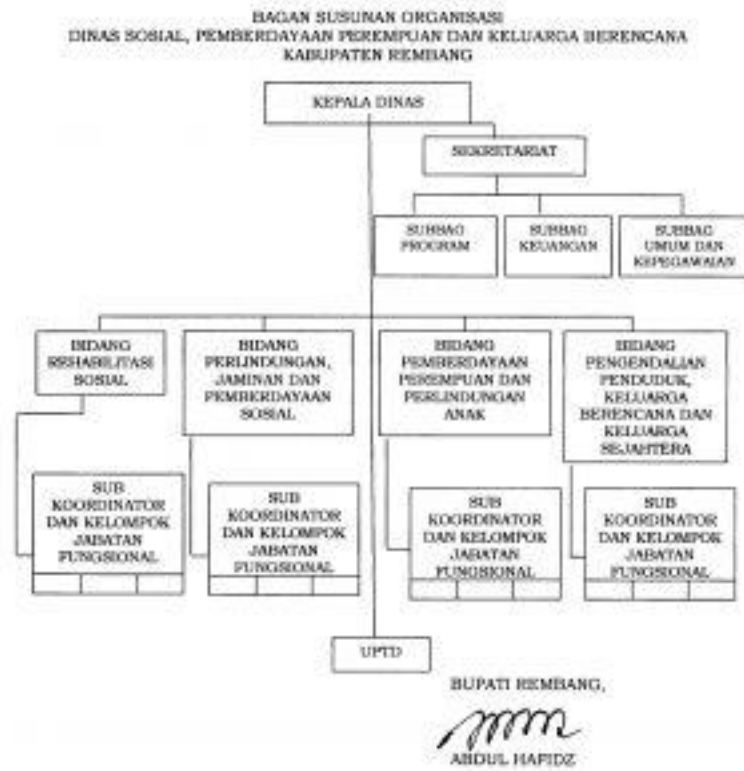
2.4.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang

Dasar hukum tersebut memberikan landasan yang jelas bagi struktur, tugas, dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dalam menjalankan tanggung jawabnya. Perlindungan jaminan sosial, pelayanan birokrasi optimal, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Selanjutnya, pembangunan masyarakat yang demokratis, berlandaskan pada sikap saling toleransi, dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) memiliki tugas utama mendukung Bupati dalam menjalankan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

1. Implementasi koordinasi kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Implementasi kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Implementasi evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Implementasi fungsi kesekretariatan dinas;
5. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
6. Implementasi fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang



**Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Rembang**

Sumber: Dinsos PPKB Rembang

Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar;
4. Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Anak;
6. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - 3.1 Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;
 - 3.2 Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana; c.
Sub Koordinator Keluarga Sejahtera.
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.